

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kawasan Asia Timur selalu menarik untuk dibincangkan karena memiliki keunikan dan sejarah yang hebat di setiap negaranya. Setiap negara tentu memiliki cara tersendiri dalam menjalankan sistem pemerintahan, hal ini dapat menjadi landasan bagi negara tersebut untuk menjalin hubungan yang baik atau justru memicu perselisihan paham dengan negara lain. Begitu pun yang terjadi dengan Tiongkok dan Korea Utara. Jika menengok masa lalu, Tiongkok dan Korea Utara memiliki hubungan yang erat seperti saudara. Kedekatan kedua negara ini menghasilkan suatu kerjasama bilateral tahun 1949 yang didasari oleh persamaan letak geografis dan ideologi negara yaitu komunis.

Perang Korea tahun 1950 menjadi titik awal dimulainya hubungan persaudaraan antara Tiongkok dan Korea Utara karena peran Tiongkok begitu nyata dengan memberikan bantuan berupa kebutuhan perang dan pasukan militer untuk berperang<sup>1</sup>. Dengan adanya persamaan geografis yang didukung oleh persamaan ideologi negara membuat Korea Utara semakin yakin dengan peran Tiongkok sebagai saudara mereka dan memiliki keyakinan bahwa Tiongkok tidak akan menimbulkan ancaman keamanan dan ideologis<sup>2</sup>.

Begitu juga dengan Tiongkok yang menjadikan Korea Utara sebagai zona penyangga antara Tiongkok dan pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di semenanjung Korea. Hal ini menjadikan Korea Utara memiliki peran penting di hubungan persaudaraan dengan

---

<sup>1</sup> Hong, S., 2014. What Does North Korea Want from China? Understanding Pyongyang's Policy Priorities toward Beijing. *The Korean Journal of International Studies*, pp. 277-303.

<sup>2</sup> Park, H. S., 2002. *North Korea: The Politics of Unconventional Wisdom*. s.l.:Boulder.

Tiongkok yang sudah mereka anggap sebagai “*Friendship cemented by blood*”<sup>3</sup>. Tiongkok dan Korea Utara semakin menyadari, bahwa dengan bersatunya kedua negara akan saling memberikan dampak positif, oleh karena itu pada tahun 1961 Tiongkok dan Korea Utara sepakat menandatangani perjanjian kerjasama yang mengikat kedua negara untuk saling membantu dan sebagai pelindung atas ideologi yang mereka anut<sup>4</sup>.

Memasuki era 2000 an hubungan Tiongkok dan Korea Utara masih terjalin dengan akrab, hal ini ditandai dengan kunjungan Presiden Tiongkok yakni Jiang Zemin ke Korea Utara pada Agustus 2001 dengan tujuan menawarkan peningkatan bantuan ekonomi dan kemanusiaan. Oktober 2005 dan Januari 2006 Hu Jintao dan Kim Jong Il datang ke Tiongkok sebagai balasan kunjungan presiden Tiongkok sebelumnya untuk membahas dan menegaskan kembali hubungan persahabatan mereka. Selain itu juga Kim Jong II mulai membahas mengenai rencana program nuklir Korea Utara serta kerjasama ekonomi berkelanjutan dengan tujuan penguatan hubungan investasi dan perdagangan bagi kedua negara. Selanjutnya, ketika Menteri Luar Negeri Korea Utara Paek Nam-Sun mengunjungi Beijing pada Mei 2006, para pemimpin Tiongkok menyarankan untuk memberikan bantuan ekonomi besar besaran kepada Korea Utara jika pembicaraan enam pihak dilanjutkan. Bantuan ekonomi ini meliputi investasi besar-besaran pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pinjaman politik, dan pendirian kompleks industri<sup>5</sup>.

Sayangnya, bantuan ini tidak pernah benar-benar diberikan kepada Korea Utara karena Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada Oktober 2006. Uji coba rudal dan nuklir Korea Utara pertama pada tahun 2006 membuat hubungan politik dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, bahkan Tiongkok menjadi tegang. Tahun 2006 DK PBB mengeluarkan

---

<sup>3</sup> Nam, C., 2010. *Beijing and The 1961 PRC-DPRK Security Treaty*. s.l.:s.n.

<sup>4</sup> Hong, S., 2014. What Does North Korea Want from China? Understanding Pyongyang’s Policy Priorities toward Beijing. *The Korean Journal of International Studies*, pp. 277-303.

<sup>5</sup> *ibid*

resolusi 1718 sebagai peringatan dan sanksi berupa embargo produk militer jenis apapun atas uji coba nuklir yang pemerintah Korea Utara lakukan. Di waktu yang bersamaan Tiongkok merespon dengan menunjukkan bentuk perlindungan agar Korea Utara terhindar dari sanksi berat. Bentuk perlindungan dari Tiongkok yakni berupa pembelaan bahwa Korea Utara memiliki hak untuk melakukan kegiatan pengembangan militer<sup>6</sup>.

Setelah uji coba nuklir kedua Pyongyang pada Mei 2009, Tiongkok mengutuk Korea Utara pada Juni 2009 dan mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874, yang memberi sanksi tambahan terhadap Korea Utara. Sikap Tiongkok terhadap Korea Utara terus mengalami perubahan di tahun 2013 yang disebabkan adanya aktivitas uji coba nuklir Korea Utara yang ketiga. Selain itu alasan berubahnya sikap Tiongkok terhadap Korea Utara dikarenakan adanya pergantian kekuasaan dari Presiden Hu Jintao menjadi Xi Jinping<sup>7</sup>. Tindakan nyata dari perubahan sikap Tiongkok terlihat ketika pemerintah Tiongkok melalui Menteri Luar Negeri Yang Jiechi melakukan protes ke Korea Utara pada tanggal 12 Februari 2013. Protes ini dilayangkan ke Duta Besar Korea Utara sebagai wujud penolakan terhadap aktivitas uji coba nuklir Korea Utara<sup>8</sup>. Bulan Mei 2013 Xi Jinping menyatakan dengan tegas kepada utusan Korea Utara Choe Ryonghae terkait denuklirisasi nuklir Semenanjung Korea dengan berkata *“the denuclerization of the Korean Peninsula and lasting peace on the peninsula is what the people want and also the trend of this time”*<sup>9</sup>.

Dengan adanya kecaman dan sanksi yang ditujukan ke Korea Utara, tidak membuat Korea Utara jera dan tetap melanjutkan program nuklirnya. Pada 2016 tepatnya bulan Januari

---

<sup>6</sup> Nanto, D. K. & Avery, E. C., 2010. North Korea: Economic Leverage and Policy Analysis. *Congressional Research Service*, pp. 7-5700.

<sup>7</sup> Miryanti, R. & Pridarita, G. T., 2020. Perubahan Respon Tiongkok Terhadap Uji Coba Nuklir Korea Utara (2013-2018). *Jurnal Dinamika Global*, Volume 5, pp. 189-218.

<sup>8</sup> Huang, K., 2017. *How China Responded to Previous North Korean Nuclear Tests*.

<sup>9</sup> Parlez, J., 2013. *China Bluntly Tells North Korea to Enter Nuclear Talks*

dan September, Korea Utara kembali melanjutkan uji coba nuklir nya. Pada momen inilah Tiongkok beserta anggota DK PBB mengeluarkan resolusi 2270 sebagai sanksi atas aktifitas uji coba nuklir yang Korea Utara lakukan. Adapun alasan Tiongkok mendukung resolusi 2270 diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok *“The Chinese side believes that the DPRK’s recent nuclear test and satellite launch violated [UN Security Council resolutions]. It is necessary for the UN Security Council to pass a new resolution on curbing the DPRK’s capabilities to develop nuclear and missile programs”*<sup>10</sup>.

Tiongkok melalui perwakilannya di PBB yaitu Liu Jieyi memberikan pernyataan resmi terkait sikap dan posisi Tiongkok terhadap resolusi 2270 *“China adheres to achieving denuclearization of the Korean Peninsula, to safeguarding peace and stability on the Korean Peninsula and to solving the issue through dialogue and consultation”*<sup>11</sup>. Sanksi tersebut merupakan sanksi terberat bagi Korea Utara pada saat itu, yang berisikan sanksi ekonomi dengan tujuan pelemahan ekonomi Korea Utara, sanksi tersebut menandakan sebuah sikap dari Tiongkok dalam menanggapi aktivitas nuklir Korea Utara. Sanksi ekonomi ini berisikan larangan perdagangan energi utama dan mineral, serta sanksi keuangan yang menargetkan aset-aset dan bank-bank Korea Utara. Resolusi ini juga membatasi berbagai dukungan finansial publik dan swasta untuk Korea Utara dan mewajibkan negara-negara untuk menutup lembaga keuangan atau afiliasi Korea Utara yang bisa berkontribusi mendukung program nuklir dan rudal balistik atau pelanggaran resolusi PBB<sup>12</sup>. Dari latar belakang tersebut terlihat proses respon Tiongkok terhadap Korea Utara dari mendukung kemudian mengecam sampai akhirnya

---

<sup>10</sup> China’s Ministry of Foreign Affairs, 2016. *Foreign Ministry Spokesperson Hong Lei’s Regular Press Conference*..

<sup>11</sup> Embassy of the People's Republic of China in the United States of America, 2016. *Permanent Representative of China to the UN Liu Jieyi Clears China's Position on Adoption of UNSCR on DPRK*..

<sup>12</sup> R. & I., 2018. Perubahan Sikap Tiongkok atas Resolusi DK PBB 2270 tentang Nuklir Korea Utara Tahun 2016. *JURNAL TRANSBORDERS*, 2(1).

memberikan sanksi. Proses respon ini kemudian diartikan sebagai adanya perubahan sikap Tiongkok terhadap Korea Utara terkait aktivitas nuklir. Lalu penulis ingin membahas penyebab Tiongkok berubah sikap terhadap Korea Utara tahun 2013 – 2016 terkait aktivitas uji coba nuklir yang Korea Utara lakukan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “apa penyebab berubahnya sikap Tiongkok terhadap Korea Utara tahun 2013-2016?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Dalam menjalankan sebuah penelitian penulis tentu memiliki tujuan akhir dari penelitian. Tujuan penelitian ini akan dibagi menjadi dua yaitu, tujuan penelitian secara umum dan secara khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk pemenuhan gelar S1 jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Pemaparan tujuan penelitian secara khusus akan dilanjutkan pada sub-bab berikutnya.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa penyebab berubahnya sikap Tiongkok terhadap Korea Utara tahun 2013-2016. Politik internasional bergerak secara dinamis seiring berjalannya waktu. Begitupun dengan kondisi politik Tiongkok dan Korea Utara yang telah berubah tidak sama seperti masa lalu. Perubahan ini didasari perbedaan kepentingan antar

negara yang mana kepentingan itu dirasa tidak sejalan sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang berbeda. Uji coba nuklir ketiga Korea Utara menjadi titik balik dalam hubungan bilateral kedua negara, yang ditandai dengan merenggangnya hubungan pimpinan kedua negara tersebut dan pemberian sanksi oleh Tiongkok terhadap Korea Utara terkait uji coba nuklir.

Perubahan sikap Tiongkok yang memberi sanksi ke Korea Utara menjadi suatu pembahasan yang menarik mengingat kedua negara ini memiliki sejarah yang baik di masa lalu. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah menambah wawasan bagi para akademisi maupun praktisi mengenai penyebab Tiongkok berubah sikap terhadap Korea Utara tahun 2013-2016.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual**

#### **1.4.1.1 *Regional Security Complex***

*Regional security complex* didefinisikan sebagai teori yang menekankan perhatian pada unsur kawasan dalam memahami dinamika keamanan internasional. *Regional security complex* berpendapat bahwa kawasan merupakan sebuah sub sistem yang signifikan dan terpisah, yang berada antara kelompok negara yang terkait dalam kedekatan geografis satu dengan yang lain<sup>13</sup>. Relasi antara negara dalam suatu kawasan dapat dilihat dari dua hal yaitu *Amity* dan *Enmity*. *Amity* merupakan hubungan yang mengatur dari pertemanan antara negara menjadi sebuah hubungan yang lebih baik dan dekat yang diharapkan menuju pada perlindungan dan dukungan

---

<sup>13</sup> Buzan, B. & Waever, O., 2003. *Regions and Powers The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.

dalam hal keamanan sedangkan *enmity* adalah hubungan yang dibentuk negara negara didalam kawasan yang dilatar belakangi oleh rasa saling curiga dan ketakutan<sup>14</sup>.

Kompleksitas keamanan kawasan merupakan sebuah definisi dari pola hubungan *amity* dan *enmity* yang terjadi dalam ruang lingkup geografis. Kompleksitas keamanan kawasan melihat bahwa kondisi keamanan kawasan bersumber pada kondisi keamanan domestik di sebuah negara. Apabila suatu negara mengalami ketidakstabilan dikuatirkan akan berdampak pada kondisi keamanan negara lain. Kompleksitas keamanan kawasan juga didefinisikan sebagai upaya negara dalam mengusahakan terciptanya keteraturan, keamanan kawasan dan keseimbangan kekuatan atau *balance of power*.

Barry Buzan dan Ole Waever merumuskan dua variabel penyusun teori kompleksitas keamanan kawasan, yaitu variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal terbagi menjadi tiga yakni letak geografis, interaksi antar negara dan kesamaan sistem. Letak geografis berbicara mengenai bagaimana letak geografis mendefinisikan suatu negara sebagai suatu kawasan. Interaksi antar negara melihat interaksi antar negara dalam kawasan, apakah interaksi berjalan baik atau buruk karena interaksi akan berpengaruh terhadap hubungan negara antar kawasan. Kesamaan sistem dilihat dari berbagai kesamaan seperti sistem budaya, ekonomi, sosial dan politik<sup>15</sup>.

Faktor internal juga melihat situasi apa yang sedang terjadi didalam suatu negara. Merujuk pada kasus ini terlihat bahwa adanya perubahan pandangan Tiongkok terhadap Korea Utara. Sebagai *emerging great power*, politik luar negeri Tiongkok semakin mengglobal dan memperlihatkan bahwa Tiongkok cenderung mengejar tujuan strategis dan kepentingan global.

---

<sup>14</sup> Buzan, B., 1991. *People, State and Fear : An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*. Second Eddition ed. London: Harvester Weatsheat.

<sup>15</sup> Buzan, B. & Waever, O., 2003. *Regions and Powers The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press

Dimulai dari sini pemimpin Tiongkok lalu beranggapan bahwa Tiongkok bukan sebagai negara berkembang yang besar namun sebagai negara besar yang perlu dikembangkan<sup>16</sup>. Pandangan ini yang kemudian dibawa Tiongkok dalam menanggapi Korea Utara. Tidak ada lagi arti hubungan khusus melainkan hanya ada hubungan normal antar negara<sup>17</sup>. Dengan kata lain hubungan antar negara tidak terikat hubungan aliansi menopang satu sama lain, melainkan hubungan normal antar negara yang dipengaruhi oleh kepentingan dan tujuan masing-masing negara.

Variabel eksternal terbagi menjadi dua yakni situasi kawasan dan isu yang sedang berkembang di kawasan. Kedua faktor ini akan melihat apakah situasi lingkungan kawasan perlu dilakukan pengaturan keamanan dan apakah isu-isu yang berkembang di kawasan dapat dijadikan alasan terciptanya pengaturan keamanan<sup>18</sup>. Dalam kasus ini, isu yang berkembang di kawasan ialah aktivitas ujicoba nuklir Korea Utara yang semakin agresif. Berubahnya rezim Korea Utara ketangan Kim Jong Un pada tahun 2011 menandakan adanya kebijakan baru yang dicetuskan oleh Kim Jong Un pada Maret 2013, kebijakan baru ini disebut *Byungjin Policy*. Kebijakan baru ini menitikberatkan nuklir sebagai prioritas utama dalam membangun kekuatan ekonomi dan militer<sup>19</sup>.

Kebijakan baru ini menjadikan Korea Utara semakin agresif melakukan uji coba nuklir, selain itu uji coba nuklir ini dijadikan Korea Utara sebagai bahan provokasi terhadap negara

---

<sup>16</sup> Lee, H., 2014. *Rising China and the Evolution of China-North Korea Relation*. s.l.:The Korean Journal of Internasional Studies.

<sup>17</sup> Chosun Media The Chosunilbo, 2013. *Top Chinese Official 'Sees No Special Relationship with N.Korea*.

<sup>18</sup> Buzan, B. & Waeber, O., 2003. *Regions and Powers The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press

<sup>19</sup> Wit, J. S. & Ahn, S. Y., 2015. *North Korea's Nuclear Future: Technology and Strategy, North Korea's Nuclear Future Series*. s.l.:s.n.

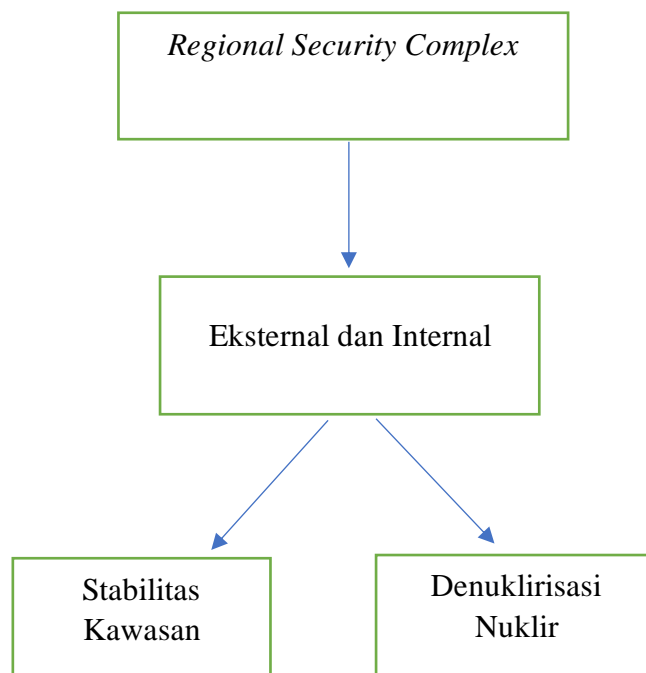


lain. Provokasi dan keagresifan nuklir Korea Utara ini ditakutkan akan mengancam stabilitas keamanan kawasan. Bagi Tiongkok kebijakan baru yang dianut Korea Utara sangat bertentangan dengan prinsip Tiongkok untuk menciptakan stabilitas kawasan dan denuklirisasi nuklir.

Melihat adanya variabel internal dan eksternal yang saling mempengaruhi dalam teori ini akan membantu penulis melihat sebab Tiongkok merubah sikapnya terhadap Korea Utara yang didasari oleh aktivitas uji coba nuklir yang membuat kekhawatiran akan stabilitas kawasan.

### 1.5 Sintesa Pemikiran

**Bagan 1. 1** Sintesa Pemikiran



Sumber: Digambar oleh Penulis

Berdasarkan latar belakang hingga kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya maka terbentuklah sintesis pemikiran sebagai berikut. Dalam menjawab rumusan masalah terkait apa penyebab berubahnya sikap Tiongkok terhadap Korea Utara tahun 2013-2016

penulis menggunakan teori *regional security complex*. Teori ini memiliki indikator berupa internal dan eksternal yang memiliki hubungan saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan yang saling mempengaruhi ini terlihat bahwa kedua indikator menjelaskan suatu kejadian yang terkait politik internasional muncul karena adanya sebab akibat. Faktor eksternal yang memperlihatkan keagresifan Korea Utara melakukan uji coba nuklir mengakibatkan adanya perubahan sikap dari internal Tiongkok terhadap Korea Utara.

## **1.6 Argumen Utama**

Berdasarkan sintesa pemikiran diatas dapat dijelaskan penyebab berubahnya sikap Tiongkok terhadap Korea Utara dilandaskan oleh dua variabel yakni variabel internal interaksi antar negara dan variabel eksternal isu yang berkembang di kawasan. Tiongkok berubah sikap karena ada faktor internal dan eksternal. Kedua indikator ini saling berhubungan karena dengan adanya indikator ini memperlihatkan bahwa suatu isu politik internasional memiliki sebab akibat yang saling mempengaruhi. Akibat dari agresif nya uji coba nuklir Korea Utara menyebabkan Tiongkok merubah sikapnya terhadap Korea Utara, maka dari itu ada keinginan Tiongkok untuk menciptakan stabilitas kawasan dan denuklirisasi nuklir.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan dalam meneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Metodologi penelitian akan memberikan rancangan pada sebuah penelitian sehingga memudahkan penulis menjawab rumusan masalah yang ada. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode eksplanatif. Metode eksplanatif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Karakteristik dari penelitian eksplanatif

yaitu, penelitian eksplanatif cenderung mencari suatu hubungan sebab akibat dari topik penelitian yang diteliti<sup>20</sup>.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi penelitian ini agar lebih berfokus pada analisisnya maka penulis telah memberikan batasan waktu. Rentang waktu penelitian ini adalah tahun 2013-2016 yang mana pada rentang tahun tersebut terdapat urgensi fenomena ini untuk diteliti. Pada 12 Februari 2013, pemerintah Tiongkok secara resmi memberikan protes kepada Duta Besar Korea Utara atas uji coba nuklir yang sedang Korea Utara lakukan. Sedangkan tahun 2016 diambil sebagai batas akhir dikarenakan pada Maret 2016 DK PBB menyepakati Resolusi 2270 untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap Korea Utara. Bagi Tiongkok yang merupakan sekutu utama Korea Utara, aktivitas pengembangan nuklir dan rudal balistik tersebut telah lama membebani hubungan baik diantara keduanya. Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan berkembangnya keterlibatan Tiongkok dalam tatanan internasional, sikap Tiongkok terhadap Korea Utara secara bertahap juga mengalami perubahan. Salah satu perubahan sikap Tiongkok atas Korea Utara terlihat pada keputusan Tiongkok menyetujui Resolusi DK PBB nomor 2270 yang merupakan resolusi terberat bagi Korea Utara saat itu. Resolusi 2270 kali ini untuk pertama kali memandatkan pelarangan perdagangan sumber daya mineral dari dan/atau ke Korea Utara.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian

---

<sup>20</sup> Budimanta, A. & Rudito, B., 2008. Metode dan Tehnik Pengolahan Community Development. *Indo Center For Suistanable Development*.

dari sumber-sumber yang telah ada<sup>21</sup>. Selain itu data sekunder juga berarti data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan<sup>22</sup>. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian<sup>23</sup>. Studi pustaka juga digunakan untuk mempelajari sumber bacaan yang dapat memberikan informasi terkait topik penelitian yang sedang diteliti<sup>24</sup>. Peneliti akan menggunakan data-data sekunder yang berbentuk *Memorandum of Understanding (MoU)*, publikasi buku, rekaman gambar, dokumen, artikel berita daring dan publikasi artikel data skunder tersebut didapat dari jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dalam, situs resmi pemerintah Tiongkok, publikasi buku dari institusi yang berwenang dan portal berita online yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami<sup>25</sup>. Berfokus pada pengamatan fenomena dan meneliti makna dari fenomena tersebut. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian

---

<sup>21</sup> Hasan, M. I., 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.

<sup>22</sup> Silalahi, U., 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: ALFABETA.

<sup>23</sup> Martono, N., 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*.

<sup>24</sup> Ruslan, R., 2008. *Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>25</sup> Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. pp. 333-345.

dengan metode kualitatif penelitian kualitatif hasilnya tidak dapat dihitung dengan angka seperti statistika. Menurut Anselm dan Corbin, penelitian kualitatif adalah penelitian yang jenis temuan-temuan yang dihasilkan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk angka, tabel dan sebagainya<sup>26</sup>. Teknik analisis data menurut Miles dan Hubberman meliputi, reduksi data yang merupakan penyerderhanaan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Kemudian, penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami<sup>27</sup>. Langkah terakhir, penarikan kesimpulan yang merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai<sup>28</sup>.

### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dari hasil penelitian penulis mengurutkan penelitian ini secara sistematis seperti berikut

**Bab I** yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, landasan konseptual, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

---

<sup>26</sup> Anselm, S. & Corbin, J., 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif.

<sup>27</sup> Miles, M. B. & Huberman, A. M., 1992. Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru).

<sup>28</sup> *ibid*

**Bab II** menjelaskan stabilitas kawasan dan denuklirisasi menggunakan faktor internal terkait interaksi antar negara dan pandangan pemerintah Tiongkok mengenai aktivitas nuklir Korea Utara.

**Bab III** menjelaskan stabilitas kawasan dan denuklirisasi menggunakan faktor eksternal yang membuat Tiongkok melakukan stabilitas kawasan dan denuklirisasi

**Bab IV** kesimpulan dan saran.